

Audit Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Ferni Dilla^{a1*}, Yustin^{a2}, Hasrianti^{a3}, Tanti^{a4}, Muharni Wardah Ningsih^{a5}, Siska Afrika^{a6}, Arman^{a7}, Muhammad Basri L^{a8}

^a Program Studi Akuntansi Sektor publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Bombana, Indonesia

¹ferniidilla@gmail.com*

*Ferni Dilla¹

Received: 17 Juli 2026; Revised: 11 Agustus 2026; Accepted: 19 Agustus 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil audit kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan desain triangulasi konkuren dan metodologi metode campuran (*mixed-methods*). Data kualitatif dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling* (staf dan pimpinan BAPPEDA Bombana), serta analisis dokumen; sementara data kuantitatif diperoleh melalui survei dan indikator pencapaian target program. Variabel penelitian mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas, serta manajemen sumber daya manusia (SDM). Analisis statistik deskriptif untuk data kuantitatif dipadukan dengan analisis data kualitatif interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BAPPEDA berada pada kategori "Baik" dengan skor 3,54, berdasarkan tingkat pencapaian target program kuantitatif sebesar 100% dan skor agregat tertimbang dari survei yang mencakup lima kriteria penting. Namun, masih diperlukan peningkatan pada aspek-aspek seperti integrasi teknologi informasi, administrasi pengadaan, kompetensi SDM, dan kerja sama lintas sektor. Penelitian ini memberikan landasan strategis bagi perbaikan tata kelola sektor publik dan menyajikan hasil audit kinerja yang komprehensif terhadap badan perencanaan daerah tersebut. Sebagai kesimpulan, audit kinerja dengan metode campuran merupakan instrumen penting dalam menyusun rencana jangka panjang untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Kata kunci – Akuntabilitas, Audit Kinerja, BAPPEDA, Efektivitas, Tata Kelola Pemerintahan

Abstract

The purpose of this study is to assess performance audit results at Bombana Regency's Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) and to pinpoint the elements that help and impede the attainment of organizational performance. The study uses a concurrent triangulation design and a mixed-methods methodology. While qualitative data was gathered thru observation, in-depth interviews with informants chosen thru purposive sampling (BAPPEDA Bombana personnel and leadership), and document analysis, quantitative data was gathered thru surveys and program target achievement indicators. Planning, implementation, monitoring and evaluation, accountability, and human resource (HR) management were all included in the research variables. Descriptive statistical analysis for the quantitative data was combined with interactive qualitative data analysis, which included data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that BAPPEDA's performance is in the "Good" category, with a score of 3.54, based on a 100% quantitative program target achievement rate and a weighted aggregate score from a survey encompassing five important criteria. However,

there is still need for growth in areas like information technology integration, procurement administration, HR proficiency, and cross-sector cooperation. This research offers a strategic basis for improving public sector governance and summarizes a thorough performance audit of the regional planning agency. To sum up, a mixed-methods performance audit is an essential tool for creating long-term plans for improving organizational performance.

Keywords - Accountability, BAPPEDA, Governance, Performance Audit, Performance Evaluation

How to Cite : Dilla, F., Yustin, Y., Hasrianti, H., Tanti, T., Ningsih, M. W., Afrika, S., ... Basri L, M. (2026). Audit Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 14(2), 362 - 373. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i2.14628>

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah. Efektivitas pembangunan tersebut sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program, bukan sekadar pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Oleh karena itu, seluruh organisasi pemerintah daerah harus senantiasa menerapkan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek operasionalnya (Putri & Rahayu, 2022). Demi memastikan pengelolaan sumber daya yang terarah, efisien, dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana perlu menerapkan prosedur audit kinerja yang ketat berdasarkan prinsip *value for money*. Tuntutan akan reformasi birokrasi telah meningkatkan urgensi audit kinerja pada badan perencanaan daerah, yang menggeser fokus penilaian dari sekadar kepatuhan administratif menuju pemeriksaan menyeluruh terhadap efektivitas program (Panggabean dkk., 2023). Perencanaan pembangunan sangat bergantung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) (Putri & Bataha, 2024). Menurut penelitian terkini, hambatan utama dalam pelaksanaan audit kinerja di sektor publik sering kali berkaitan dengan kesulitan dalam menilai dampak program, keterbatasan kapasitas manajerial, serta sistem pengawasan internal (Nasution & Faridani, 2025). Selain itu, telah terbukti bahwa penerapan prinsip *value for money* dalam prosedur audit secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan standar tata kelola pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan permasalahan kontekstual (Edi Purnomo dkk., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan akademis dengan menyajikan pendekatan diagnostik menyeluruh bagi BAPPEDA Kabupaten Bombana yang menghubungkan pencapaian keluaran (*output*) dengan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu komponen kunci dalam sistem pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), yang terutama bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan program di antara berbagai instansi daerah, serta secara rutin mengevaluasi capaian pembangunan (Hidayat & Pratama, 2023). Menurut Prasetyo dkk. (2023), peran penting ini menuntut adanya mekanisme pengawasan yang melampaui sekadar evaluasi kepatuhan akuntansi formal seperti dalam audit keuangan untuk menilai sejauh mana kegiatan operasional dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (prinsip *value for money*) melalui audit kinerja. Secara administratif, capaian program secara kuantitatif telah mencapai target 100%, sebagaimana diamati di BAPPEDA Kabupaten Bombana. Namun, kualitas substantif perencanaan, efektivitas kerja sama lintas sektor, maupun dampak nyata bagi masyarakat tidak selalu tercermin dalam tingkat penyerapan anggaran dan penyelesaian target fisik yang tinggi tersebut.

Tinjauan literatur mengenai audit kinerja sektor publik selama lima tahun terakhir menunjukkan dua tren utama. Pertama, penelitian berfokus pada instansi teknis seperti dinas pekerjaan umum dan dinas Kesehatan yang menggunakan metrik kinerja konkret dan dapat diukur secara kuantitatif. Kedua, studi mengenai sekretariat atau organisasi pengelola keuangan daerah umumnya menilai penyerapan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, studi

mengenai efektivitas BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagian besar memusatkan perhatian pada fungsinya dalam penyusunan dokumen dan perencanaan pembangunan daerah (Panggabean dkk., 2023; Putri & Bataha, 2024).

Belum terdapat model penilaian yang mapan dalam literatur yang dirancang untuk mengukur efektivitas BAPPEDA sebagai entitas yang bertanggung jawab atas perencanaan dan koordinasi pembangunan. Anggaran atau keluaran (*output*) semata tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja BAPPEDA sebagai badan koordinasi. Evaluasi tersebut harus mencakup kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sistem pelaporan pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas pelaporan, sumber daya manusia, serta tata kelola organisasi. Selain itu, hasil penelitian terdahulu cenderung lebih mengutamakan analisis kinerja kuantitatif dibandingkan pemeriksaan kualitatif terhadap variabel-variabel yang memengaruhi kinerja tersebut. Akibatnya, temuan evaluasi tidak mampu memberikan gambaran diagnostik yang menjelaskan secara menyeluruh mengenai penyebab kegagalan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Penelitian ini berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan merancang audit kinerja terintegrasi yang mempertimbangkan berbagai aspek organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan pandangan Purnomo dkk. (2024) serta Faizal dan Nugrahanti (2026), kerangka kerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah, memperkuat akuntabilitas, dan memperbaiki kualitas tata kelola. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya.

Penelitian ini memiliki dua elemen utama yang menjadi kontribusi intelektualnya. Pendekatan yang digunakan memadukan evaluasi kuantitatif berdasarkan lima indikator kinerja krusial dengan analisis kualitatif mendalam mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan di lapangan. Studi ini menelaah BAPPEDA Kabupaten Bombana dari perspektif praktis maupun kontekstual guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana koordinasi antarinstansi, aksesibilitas data, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memengaruhi efektivitas audit kinerja sektor publik di tingkat daerah.

METODE

Metodologi dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain triangulasi konkuren sebagai bagian dari pendekatan metode campuran (*mixed-methods*). Pemilihan desain ini didasarkan pada gagasan bahwa audit kinerja pada instansi sektor publik merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat diteliti secara memadai hanya dengan satu metode saja. Sementara metode kualitatif digunakan untuk menelaah lingkungan, prosedur, dan dinamika internal yang tidak dapat digambarkan oleh data numerik semata, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menyajikan sasaran kinerja yang terukur dan terstandarisasi.

Dalam menjawab dua fokus utama penelitian yaitu tingkat kinerja yang dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Bombana pada lima aspek audit serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi kinerja tersebut kedua metode ini saling melengkapi dengan baik. Pada tahap analisis, data kuantitatif maupun kualitatif dikumpulkan dan diolah secara bersamaan, kemudian digabungkan pada tahap interpretasi. Metode ini menghasilkan informasi yang bersifat diagnostik-kuantitatif sekaligus eksplanatori-kualitatif, sehingga menciptakan gambaran kinerja yang utuh.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Lokasi ini dipilih secara sengaja karena BAPPEDA berperan sebagai lembaga perencanaan utama dan memiliki tugas kinerja khusus, seperti perumusan regulasi, kerja sama antarinstansi, serta pengelolaan proyek pembangunan daerah. Lima aspek utama audit kinerja yang menjadi objek penelitian ini meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas dan pelaporan, serta sumber daya

manusia dan tata kelola organisasi.

Akurasi alokasi anggaran berbasis prioritas, koherensi dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, dan Renstra), serta kualitas proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi komponen perencanaan dan penganggaran. Komponen pelaksanaan program menilai ketepatan waktu realisasi fisik, kecepatan penyerapan anggaran, dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Komponen pemantauan dan evaluasi menilai frekuensi penyusunan laporan, pemanfaatan sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi, serta penggunaan hasil evaluasi sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan. Komponen akuntabilitas dan pelaporan menilai keandalan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pertanggungjawaban keuangan, dan transparansi informasi publik. Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana (JFP), budaya kerja, serta kesesuaian pemisahan tugas dan fungsi dievaluasi melalui komponen sumber daya manusia dan tata kelola organisasi.

Sumber Data dan Metode Pengambilan Sampel

Data penelitian mencakup sumber primer maupun sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana melalui kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi instansi, seperti laporan audit kinerja, rencana pembangunan daerah tahunan dan jangka menengah (RKPD dan RPJMD), rencana strategis (Renstra), laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), serta berkas administrasi terkait.

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini bekerja di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bombana. Seluruh 30 pegawai berpartisipasi sebagai responden dalam survei terstruktur dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh (*saturation sampling*). Strategi ini dipilih karena ukuran populasi yang kecil, guna mencegah bias representasi dan menjamin partisipasi penuh. Untuk menghindari jawaban netral yang ambigu, kuesioner menggunakan skala Likert empat poin (1–4).

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih tiga informan kunci yang mewakili dua tingkat analisis untuk keperluan wawancara mendalam. Kategori pertama terdiri dari Kepala BAPPEDA serta pejabat struktural atau pimpinan lain yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan perencanaan. Kelompok kedua mencakup pejabat teknis dan pegawai fungsional dengan pangkat/golongan Pembina dan Penata Tk. I, yang bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan, laporan akuntabilitas kinerja (LKjIP), serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (M&E). Kategorisasi informan ini menjamin adanya triangulasi sudut pandang antara pembuat kebijakan dan pelaksana teknis di lapangan.

Pengembangan Instrumen dan Pengumpulan Data

Standar audit kinerja berbasis *Value for Money* (3E) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan standar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi landasan bagi pengembangan metodis instrumen penelitian, yang juga mencakup penyesuaian terhadap aspek teknis perencanaan daerah. Struktur instrumen tersebut dijabarkan ke dalam indikator yang dapat diukur dan pernyataan operasional, yang kemudian menjalani uji validitas isi melalui pendapat ahli dari kalangan akademisi administrasi publik dan profesional audit internal.

Sebelum digunakan dalam studi utama, instrumen tersebut menjalani uji coba untuk menilai keterbacaan, kejelasan bahasa, perkiraan waktu penyelesaian, dan keandalan awal. Untuk mengumpulkan data primer di lapangan, tiga puluh responden mengisi kuesioner terpandu, tiga informan kunci berpartisipasi dalam wawancara semi-terstruktur, dan penilaian dokumen dilakukan menggunakan daftar periksa dokumen resmi instansi.

Analisis Data Kuantitatif dan Perhitungan Skor

Informasi kuantitatif dari survei diolah menggunakan analisis statistik deskriptif dan metode

penilaian rata-rata tertimbang. Metode pembobotan ini memperhitungkan perbedaan tingkat kepentingan strategis di antara komponen-komponen audit dengan memberikan bobot lebih besar pada bagian perencanaan serta pemantauan dan evaluasi (M&E) dibandingkan dengan faktor-faktor pendukung. Skor akhir dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Skor}_{\text{akhir}} = \sum_{i=1}^5 (W_i \times \bar{X}_i)$$

di mana $\bar{X}_i$ adalah skor respons rata-rata untuk aspek tersebut dan W_i adalah bobot relatif dari aspek ke-i. Rentang skala interval 1,00–1,75 (Buruk), 1,76–2,50 (Di Bawah Rata-rata), 2,51–3,25 (Cukup/Baik), dan 3,26–4,00 (Baik) kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan skor agregat akhir sebesar 3,54. Untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan prioritas, analisis tersebut menampilkan nilai untuk setiap elemen dan indikator di samping skor keseluruhan.

Analisis dan Integrasi Data Kualitatif

Informasi kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan tanggapan kuesioner terbuka dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Tiga proses yang bersifat siklikal dalam paradigma ini adalah kondensasi data, penyajian data (menggunakan matriks faktor pendukung dan penghambat), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor kontekstual memengaruhi hasil kinerja.

Validasi konvergen digunakan untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif pada tahap interpretasi akhir. Kesesuaian antara data kuantitatif dan kualitatif memperkuat bukti analisis. Di sisi lain, jika terdapat perbedaan antara hasil kuesioner dan temuan wawancara, analisis mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kontekstual yang mendasarinya.

Validitas Data

Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk menjamin validitas data kualitatif. Triangulasi metode dilakukan dengan memverifikasi konsistensi antara temuan kuantitatif (skor per aspek) dan temuan kualitatif (hasil wawancara dan dokumen), sedangkan triangulasi sumber melibatkan perbandingan informasi dari berbagai sumber yang memiliki posisi berbeda. Sementara itu, penggunaan pengambilan sampel jenuh (*saturated sampling*) mendukung validitas data kuantitatif; dengan demikian, skor rata-rata yang diperoleh selama periode penelitian secara akurat mencerminkan pendapat seluruh pegawai BAPPEDA Kabupaten Bombana.

PEMBAHASAN

Dinamika Kinerja dan Penilaian BAPPEDA Bombana

Kerangka teoretis *Value for Money* yang dioperasionalkan melalui prinsip 3E, yaitu *Economy* (meminimalkan biaya input), *Efficiency* (rasio input-output), dan *Effectiveness* (pencapaian tujuan dan dampak) secara eksplisit menempatkan penilaian audit kinerja dalam studi ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar ukuran administratif atas pencapaian output (Fattah, 2025; Laoli, 2019; Purnomo dkk., 2024). Pemilihan kerangka kerja ini merupakan keputusan metodologis yang menentukan bagaimana peringkat kinerja dievaluasi, di samping juga menjadi preferensi konseptual.

Dengan realisasi fisik sebesar 100% dan tingkat penyerapan anggaran di atas 95%, BAPPEDA Kabupaten Bombana memperoleh skor agregat 3,54, yang dikategorikan sebagai "Baik". Namun, terdapat risiko munculnya rasa "kenyamanan semu" sebuah jaminan administratif yang belum tentu mencerminkan pencapaian yang substansial jika skor agregat tersebut tidak diuraikan ke dalam ketiga aspek 3E. Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini tidak sekadar merangkum data; sebaliknya, pembahasan tersebut secara metodis menempatkan setiap temuan lapangan dalam hubungan dialektis dengan prinsip 3E dan penelitian terdahulu, sehingga mampu menggambarkan secara jelas kontribusi

studi ini terhadap khazanah pengetahuan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penilaian Audit Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bombana

Aspek Penilaian Audit kinerja	Skor	Kategori	Bobot	Indikator Kunci Pembentuk Skor dan Sumber Bukti
Perencanaan dan penganggaran	3,60	Baik	25%	Konsistensi antara RPJMD, RKPD, dan Rencana Strategis; Akurasi Alokasi Anggaran; Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Pelaksanaan Program dan Kegiatan	3,55	Baik	20%	Kepatuhan terhadap SOP, penyerapan anggaran, dan implementasi nyata
Monitoring dan Evaluasi	3,45	Baik	20%	Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi (M&E), Sistem Informasi M&E, dan Pemanfaatan Hasil M&E
Akuntabilitas dan Pelaporan	3,50	Baik	15%	Keterpercayaan akuntabilitas keuangan, transparansi informasi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tata Kelola SDM dan Organisasi	3,60	Baik	20%	Budaya kerja, kompetensi Pejabat Fungsional (JFP), serta pembagian tugas dan fungsi
Nilai Akhir Terimbang	3,54	Baik	100%	Rata-rata tertimbang dari lima belas indikator tersebut

Sumber : Data Primer diolah, 2026

Kategori interval 1,00–1,75 (Buruk), 1,76–2,50 (Di Bawah Rata-rata), 2,51–3,25 (Baik), dan 3,26–4,00 (Sangat Baik) digunakan untuk memperoleh seluruh skor indikator berdasarkan rata-rata tanggapan terhadap kuesioner berskala Likert 1-4. Skor-skor tersebut kemudian divalidasi melalui

triangulasi metodologis yang melibatkan dokumen resmi instansi dan wawancara mendalam. Rumus berikut digunakan untuk menentukan skor agregat:

$$\text{Skor Akhir} = \sum_{i=1}^5 (W_i \times \bar{X}_i)$$

Di mana $\bar{X}_i$ adalah skor respons rata-rata untuk aspek ke- i dan W_i adalah bobot relatifnya.

Dinamika Perencanaan dan Penganggaran: Tinjauan Kritis terhadap Aspek Ekonomis dan Efisiensi

Dengan bobot keseluruhan sebesar 25%, komponen Perencanaan dan Penganggaran memperoleh skor 3,60 yang didasarkan pada tiga indikator: Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (3,52), Akurasi Alokasi Anggaran Berbasis Prioritas (3,58), dan Konsistensi Substansial antara RPJMD, RKPD, dan Renstra (3,70). Distribusi skor ini mengungkapkan pola teoretis yang kaya untuk dikaji dalam kerangka konsep "3E". Dari segi aspek ekonomis (*Economy*), skor tinggi pada Konsistensi Substansial (3,70) mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi perencanaan digital telah menekan biaya koordinasi antar-dokumen, sehingga menjamin dokumen akhir tidak memerlukan penyesuaian signifikan saat memasuki tahap penganggaran. Namun, dari segi efisiensi (*Efficiency*) dan efektivitas (*Effectiveness*), skor Akurasi Alokasi Anggaran Berbasis Prioritas sebesar 3,58 menunjukkan bahwa meskipun dokumen teknokratis telah lengkap, masukan dari legislatif daerah tetap memengaruhi komposisi anggaran aktual dalam APBD; akibatnya, alokasi anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan prioritas jangka panjang yang disusun melalui proses teknokratis. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mungkin berhasil menekan biaya koordinasi, namun ketika intervensi politik dalam penganggaran menyimpang dari dokumen teknis, lembaga tersebut tidak mampu menjamin rasio input-output yang ideal. Situasi ini menyoroti adanya kesenjangan yang jarang dibahas secara khusus dalam literatur yang ada saat ini.

Hasil-hasil ini mendukung sekaligus bertentangan dengan studi-studi sebelumnya. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi Khoirunurrofik dan Rahmawati (2021) yang menunjukkan bahwa konsistensi antara perencanaan dan penganggaran merupakan variabel signifikan dalam mengendalikan siklus anggaran politik. Skor Akurasi Alokasi Anggaran tercatat hanya sebesar 3,58, angka yang berada di bawah kisaran 3,70-3,80 yang semestinya dapat dicapai seandainya tidak ada intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh daripada sekadar mengonfirmasi tesis Khoirunurrofik dan Rahmawati dengan menunjukkan bahwa jalur intervensi yang paling nyata terjadi pada tahap pasca-pembahasan perencanaan, khususnya ketika usulan DPRD dimasukkan ke dalam dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi substantif dalam dokumen awal tidak lagi menjamin adanya konsistensi pada anggaran akhir.

Katho dan Irawan (2017) menemukan lima penyebab ketidakkonsistenan dalam kasus Kabupaten Belu: kurangnya pengetahuan mengenai sumber daya manusia, perbedaan tingkat komitmen pemangku kepentingan, penggunaan aplikasi yang tidak terintegrasi, intervensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta kebijakan pemerintah pusat. Selain mengonfirmasi daftar karakteristik tersebut, penelitian ini menambahkan elemen kontekstual baru yang khas bagi BAPPEDA sebagai lembaga perencana utama: lemahnya kualitas deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini ditunjukkan oleh skor indikator ketiga sebesar 3,52, yang merupakan skor terendah di antara ketiga indikator dalam komponen Perencanaan. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini terkait aspek Perencanaan tidak sekadar menunjukkan konsistensi dengan penelitian terdahulu; penelitian ini mengungkapkan adanya pola kerentanan politik yang berkurang seiring menguatnya nuansa politis dalam proses perencanaan yang tercermin dalam hierarki skor antarindikator ($3,70 > 3,58 > 3,52$). Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai BAPPEDA, seperti yang dilakukan oleh Putri dan Bataha (2024) di Kabupaten Sidoarjo dan Panggabean dkk. (2023) di Kota Medan, belum menyoroti temuan ini secara spesifik. Studi-studi tersebut mengevaluasi aspek

perencanaan hanya dari perspektif administratif tanpa menelaah distribusi skor pada masing-masing indikator.

Dinamika Aspek Pelaksanaan Program: Menilai Efektivitas, Efisiensi, dan Kualitas Belanja

Berdasarkan indikator Realisasi Fisik Triwulanan (3,65), Penyerapan Anggaran (3,60), dan Kepatuhan terhadap SOP (3,40), komponen Pelaksanaan Program memperoleh skor 3,55 (bobot 20%). Distribusi skor ini menyoroti kelemahan struktural yang krusial jika ditinjau melalui prinsip "3E": skor Efektivitas yang tinggi pada dimensi keluaran (*output*) tidak dibarengi dengan skor Efisiensi yang sepadan pada dimensi proses. Dengan kata lain, BAPPEDA mampu menunjukkan bahwa seluruh target fisik tercapai sepenuhnya (100%), namun gagal membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan telah digunakan secara efektif. Skor Kepatuhan terhadap SOP yang paling rendah dalam kategori ini, yakni 3,40, mengindikasikan adanya kecenderungan "kepatuhan yang bersifat formalitas." Hal ini dikritik oleh Nasution dan Faridani (2025) sebagai fenomena "audit kinerja seremonial," di mana kualitas proses belanja itu sendiri bukanlah tolok ukur utama keberhasilan, melainkan penyerapan anggaran secara keseluruhan. Meskipun unit pengadaan barang dan jasa biasanya menjadi sasaran kritik semacam itu, studi ini memperluas analisis dengan menunjukkan bahwa kepatuhan formalistik juga terjadi di unit perencanaan; di sana, dokumen SOP lebih berfungsi sebagai formalitas administratif ketimbang sebagai pedoman bagi operasional sehari-hari..

Studi ini mengungkap dinamika tambahan dibandingkan dengan temuan Purnomo dkk. (2024), yang menunjukkan adanya korelasi signifikan antara opini audit, temuan audit, dan kinerja pemerintah daerah berdasarkan konsep *Value for Money* (termasuk selama pandemi COVID-19). Korelasi ini tidak selalu terjamin pada lembaga perencana utama. Prinsip *Value for Money* tidak sepenuhnya terwujud di BAPPEDA Kabupaten Bombana meskipun penyerapan anggaran tinggi dan target realisasi fisik tercapai karena belanja operasional yang terkait dengan aspek *Economy* (efisiensi biaya) tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat. Di sisi lain, menurut Panggabean dkk. (2023), BAPPEDA Kota Medan menghadapi kendala yang lebih signifikan terkait kerja sama antar-instansi (OPD), yang mengindikasikan bahwa konteks kegagalan aspek *Efficiency* dapat berbeda tergantung pada lokasinya. Studi ini mendukung temuan sebelumnya dengan memberikan analisis diagnostik khusus: alih-alih masalah koordinasi antar-instansi, kegagalan aspek *Efficiency* di BAPPEDA Kabupaten Bombana terutama disebabkan oleh kegagalan dalam kepatuhan terhadap proses internal (skor SOP sebesar 3,40). Oleh karena itu, saran perbaikan sebaiknya lebih menekankan pada pembenahan SOP internal daripada sekadar memperkuat forum koordinasi.

Dinamika Aspek Pemantauan dan Evaluasi: Kegagalan Siklus Umpan Balik

Berdasarkan indikator Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi (M&E) Berkala (3,60), Pemanfaatan Sistem Informasi M&E (3,40), dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (3,35), elemen M&E mencatat skor terendah sebesar 3,45 (bobot 20%). Analisis terhadap ketiga skor tersebut menunjukkan bahwa meskipun BAPPEDA berhasil membangun lapisan pelaporan (dengan laporan yang tersedia dan bersifat berkala), lembaga ini gagal mengembangkan lapisan umpan balik (karena hasil M&E tidak pernah digunakan sebagai masukan untuk perencanaan selanjutnya). Pola ini sejalan dengan kerangka teoretis umpan balik siklus tertutup (*closed-loop feedback*) yang menempatkan M&E setara dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan (Akhmadi dkk., 2016; Ismail & Gunawan, 2018). Dalam arsitektur ini, fungsi M&E berperan sebagai mekanisme korektif bagi keputusan perencanaan tahun mendatang, di samping menyediakan data capaian triwulanan. Terputusnya siklus umpan balik tercermin dari skor terendah dalam keseluruhan studi, yakni 3,35 untuk indikator "Tindak Lanjut Hasil Evaluasi"; akibatnya, BAPPEDA menjalankan siklus perencanaan-pelaksanaan-pelaporan secara linear, bukan secara siklis. Kondisi ini menjelaskan mengapa capaian kinerja cenderung stagnan dari tahun ke tahun, karena organisasi tidak memiliki proses pembelajaran organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi internal.

Berbagai literatur yang ada secara konsisten mendukung temuan-temuan ini. Taufik (2013)

menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (M&E) dalam kerangka SAKIP di tingkat daerah masih belum memadai karena hasil M&E sering kali hanya berhenti pada tahap pelaporan, alih-alih menjadi landasan bagi pengembangan program. Menurut Akhmadi dkk. (2016), sistem M&E di lima kementerian menunjukkan kelemahan struktural yang serupa: meskipun laporan tersedia, pemanfaatannya terbatas pada aspek akuntabilitas vertikal. Kelemahan serupa terkait auditor internal juga dicatat oleh Surahmi dkk. (2025), yang menyoroti bahwa hambatan signifikan dalam audit kinerja adalah tindak lanjut yang tidak memadai terhadap rekomendasi yang diberikan. Studi ini tidak sekadar memvalidasi pola kegagalan siklus umpan balik yang terus berulang tersebut. Studi ini mengukur tingkat kegagalan siklus umpan balik di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bombana dengan skor 3,35—menyajikan bukti empiris pertama di tingkat badan perencanaan daerah serta menunjukkan bahwa ketersediaan sistem informasi M&E digital (dengan skor 3,40) tidak secara otomatis menyelesaikan masalah siklus umpan balik; hal ini dikarenakan sistem informasi tanpa adanya komitmen kelembagaan untuk menindaklanjuti temuan hanyalah sekadar alat pelaporan elektronik. Meskipun memiliki infrastruktur teknis yang memadai, sistem informasi M&E yang ada saat ini tidak mampu berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi BAPPEDA akibat keterbatasan dalam format penilaian kinerja, yang sering kali gagal menangkap hasil kinerja yang substantif (Ismail dan Gunawan, 2018).

Dinamika Akuntabilitas dan Pelaporan: Transparansi Publik vs. Kepatuhan Vertikal

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) yang tepat waktu (skor 3,60), Akuntabilitas Keuangan (3,55), dan Transparansi Publik (3,35) merupakan indikator-indikator yang berkontribusi terhadap skor aspek Akuntabilitas dan Pelaporan sebesar 3,50 (dengan bobot 15%). Kesenjangan antara akuntabilitas publik dan vertikal di BAPPEDA Kabupaten Bombana terlihat jelas dari distribusi skor ini. Tanggung jawab vertikal yaitu akuntabilitas kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah berhasil dipenuhi, mengingat LKjIP disusun tepat waktu dan laporan keuangan memperoleh opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) setelah diaudit. Namun, Transparansi Publik memperoleh skor terendah sebesar 3,35 (skor terendah dalam kategori ini), yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas horizontal—khususnya keterbukaan informasi kinerja kepada publik belum mendapatkan perhatian yang setara. Kesenjangan ini memunculkan interpretasi teoretis yang penting: dalam konteks otonomi daerah, akuntabilitas horizontal menuntut perubahan budaya organisasi yang lebih mendalam, sementara akuntabilitas vertikal cenderung menjadi "ritual kepatuhan" yang dilakukan demi memenuhi regulasi tanpa mengubah perilaku organisasi (Faizal & Nugrahanti, 2026; Sunah & Yudartha, 2025).

Hasil-hasil ini memberikan sudut pandang baru sekaligus mendukung penelitian terdahulu. Meskipun Faizal dan Nugrahanti (2026) secara umum menyatakan bahwa audit kinerja dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas publik, studi ini menunjukkan bahwa kemampuan tersebut tidak serta-merta terwujud; hal itu bergantung pada tingkat transparansi publik yang didukung secara kuantitatif (dengan skor 3,35). Menurut studi kasus oleh Sunah dan Yudartha (2025) mengenai penerapan SAKIP di Bali, ketika teknologi informasi dan budaya birokrasi yang adaptif tersedia, akuntabilitas secara bertahap bertransformasi dari sekadar alat kepatuhan menjadi instrumen reflektif; sebaliknya, di BAPPEDA Kabupaten Bombana, ketiadaan kondisi-kondisi tersebut menyebabkan akuntabilitas terbatas pada tingkat kepatuhan semata.

Tradisi *tudang sipulung* dan transparansi memberikan dampak positif terhadap kinerja anggaran, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan di Kota Parepare oleh Arodhiskara dkk. (2020). Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi merupakan bagian esensial dari kinerja anggaran, bukan sekadar elemen kosmetik. Rendahnya skor Transparansi Publik (3,35) di Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa pelibatan publik dan mekanisme musyawarah dari bawah ke atas (*bottom-up*) masih berada pada tahap awal perkembangannya. Oleh karena itu, kontribusi teoretis studi ini terhadap konsep akuntabilitas melampaui sekadar keselarasan dengan penelitian terdahulu; studi ini menyajikan bukti empiris bahwa tanggung jawab vertikal dan horizontal di dalam BAPPEDA

berada pada tingkat yang sangat berbeda dan tidak berjalan secara bersamaan.

Tata Kelola Organisasi dan Dinamika SDM: Hambatan bagi Birokrasi Berbasis Bukti

Komponen Tata Kelola Organisasi dan SDM yang mencakup indikator Pembagian Tugas dan Fungsi (3,68), Iklim Organisasi (3,62), dan Kapasitas Pejabat Fungsional Perencana/JFP (3,50) memperoleh skor 3,60 (bobot 20%). Distribusi kapasitas substantif pada komponen ini jauh dari seimbang, meskipun skor keseluruhannya setara dengan aspek Perencanaan dan Penganggaran. Dua indikator pertama menunjukkan kekuatan baik dari segi struktural maupun budaya, sedangkan indikator ketiga Kapasitas JFP hanya mencatatkan skor 3,50, yang mengindikasikan adanya keterbatasan kritis dalam kapasitas analisis fungsional. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa jumlah JFP bersertifikat di BAPPEDA Kabupaten Bombana masih sangat minim. Akibatnya, penyusunan dokumen strategis hanya dilakukan oleh segelintir pejabat, dan pembaruan dokumen perencanaan sering kali hanya berupa tindakan "salin-tempel" (copy-paste) dari tahun anggaran sebelumnya. Pola kerja seperti ini bertolak belakang dengan prinsip kebijakan berbasis bukti, yang menuntut agar keputusan perencanaan didasarkan pada analisis data yang cermat dan kontekstual.

Hasil-hasil ini meninjau dan memperluas cakupan penelitian sebelumnya. Menurut Darman dkk. (2025), kemampuan aparat pemerintah daerah untuk memanfaatkan statistik secara rutin merupakan prasyarat bagi reformasi birokrasi daerah. Studi ini menunjukkan bahwa kapasitas reformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana terhambat secara langsung oleh terbatasnya kemampuan analisis Pejabat Fungsional (JFP) (dengan skor 3,50). Studi ini juga memperlihatkan bahwa skor keseluruhan Sumber Daya Manusia yang tergolong "Baik" ternyata menutupi adanya defisit fungsional yang signifikan. Menurut Faizal dan Nugrahanti (2026), audit kinerja menuntut adanya auditor dengan kapasitas teknis yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa pihak yang diaudit seperti BAPPEDA, yang seharusnya menjadi mitra krusial dalam peningkatan kinerja ternyata juga memiliki kapasitas yang belum memadai.

Keterbatasan kapasitas serupa ditemukan pada auditor fungsional di Sulawesi Selatan oleh Surahmi dkk. (2025). Studi ini mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan adanya keterbatasan serupa dalam peran fungsional perencana, yang mengindikasikan bahwa kendala kapasitas fungsional ini tidak terbatas pada peran tertentu, melainkan mencerminkan pola kegagalan yang lebih luas dalam pengembangan pejabat fungsional di Indonesia Timur. Dalam konteks BAPPEDA Kabupaten Bombana, keterbatasan kapasitas perencana fungsional dan kekakuan format SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) kemungkinan besar saling memperparah keadaan, sehingga menghambat peningkatan signifikan dalam kapasitas analisis pegawai negeri sipil seiring berjalannya waktu. Ismail dan Gunawan (2018) lebih lanjut menunjukkan bahwa format penilaian kinerja yang kaku menghambat perwujudan kinerja yang substantif. Dengan demikian, kontribusi teoretis studi ini di bidang sumber daya manusia tidak hanya memperluas literatur mengenai kapasitas fungsional hingga mencakup peran perencana, tetapi juga menyoroti bagaimana interaksi antara kendala kapasitas internal dan kelemahan dalam format penilaian kinerja nasional turut melanggengkan kesenjangan kapasitas tersebut.

KESIMPULAN

Dengan skor akhir tertimbang sebesar 3,54, studi ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana berada dalam kategori "baik". Meskipun tingkat penyerapan anggaran melampaui 95% dan realisasi fisik mencapai 100%, analisis *Value for Money* (nilai atas uang) menunjukkan bahwa pencapaian administratif tersebut tidak secara akurat mencerminkan kinerja substantif. Tiga kesimpulan penting diperoleh: masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan formal, transparansi publik, dan kapasitas analitis Pejabat Fungsional Perencana; fungsi pemantauan dan evaluasi belum berjalan sebagai sistem umpan balik tertutup (*closed-loop feedback system*) untuk memperbaiki perencanaan; serta intervensi politik dalam revisi

anggaran (APBD) dapat mengganggu efisiensi alokasi.

Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa audit kinerja bukan sekadar alat untuk memverifikasi pelaksanaan anggaran, melainkan sarana untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan meninjau aspek kehematan (ekonomi), efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap proses, serta kualitas tindak lanjut. Studi ini memperkaya pemahaman bahwa tinjauan kinerja BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) perlu mempertimbangkan kerentanan politis dalam proses penganggaran dan kepatuhan terhadap prosedur internal, di samping hasil yang terukur serta tingkat penyerapan anggaran.

Langkah-langkah yang diperlukan meliputi: verifikasi yang lebih ketat terhadap usulan yang berasal dari "Pokok-Pokok Pikiran" DPRD guna memastikan keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mencegah penumpukan belanja di akhir tahun; pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar perbaikan program dan alokasi anggaran; pemberian akses publik terhadap dokumen kinerja; serta upaya menjamin pembagian beban kerja yang lebih merata di samping sertifikasi kompetensi bagi Perencana Fungsional. Langkah-langkah ini penting untuk mentransformasi pola kerja—dari yang semula menitikberatkan pada kepatuhan yang bersifat formalitas menuju perencanaan berbasis bukti sehingga audit kinerja dapat berfungsi sebagai instrumen bagi perbaikan organisasi yang berkelanjutan.

Batasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana merupakan satu-satunya kasus yang dikaji dalam penelitian ini, yang menggunakan instrumen yang sebagian besar bersumber dari persepsi internal dan triangulasi dokumen resmi. Oleh karena itu, kehati-hatian diperlukan saat melakukan ekstrapolasi terhadap hasil penelitian ini.

Dua topik dapat menjadi fokus penelitian di masa mendatang. Pertama, pengembangan model audit kinerja yang disesuaikan dengan perencanaan daerah, yang memadukan metrik *Value for Money* dengan indeks ketahanan politik untuk mengukur seberapa tangguh dokumen perencanaan terhadap perubahan alokasi anggaran. Kedua, evaluasi mengenai bagaimana tingkat pelaksanaan rekomendasi audit memengaruhi peningkatan kinerja organisasi dan kualitas kebijakan dalam jangka panjang, melalui studi komparatif atau longitudinal yang menggunakan sistem pelacakan tindak lanjut rekomendasi audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., Setiowati, N. E., & Saefullah, E. (2025). Akuntabilitas publik: Peran audit kinerja, pengendalian, dan pengawasan. *Journal of Sharia Accounting and Tax*, 3(2), 458–467. <https://doi.org/10.70095/jsat.v3i2.416>
- Amrin, A., Mahmud, M. K., & Nurfurkon, A. (2023). Implementasi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Sumedang. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 8(1), 42–55. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3357>
- Anjani, F. Z., & Fadly, R. (2023). Pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada Komisi Yudisial. *Journal on Education*, 6(1), 8979–8987. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4380>
- Arodhiskara, Y., Mas'ud, M., Su'un, M., & Mursalim, M. (2021). The influence of Tudang Sipulung, public accountability, and transparency to the regional budget performance of the municipality of Parepare. *Management Science Letters*, 11(1), 49–56. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.8.031>
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.419>
- Darman, D., Rahmat, R., & Suwardi, S. (2025). Penguatan Kapasitas Statistik Aparatur Daerah dalam

- Mendukung Evidence-Based Policy. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 12(1), 89–102.
- Edi Purnomo, D., Safitri, D., & Fithrayudi Triatmaja, M. (2024). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Se-Provinsi Jawa Tengah Berkonsep Value For Money Saat Covid 19. *Neraca*, 20(1), 87–93. <https://doi.org/10.48144/neraca.v20i1.1850>
- Faizal, D., & Nugrahanti, T. P. (2026). Audit kinerja sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas publik di sektor pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 5475–5483. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36988>
- Hanif, S. K., Sihombing, L. V. F., Pakpahan, Y., Fajri, M. Y., & Nababan, A. A. (2025). Transparansi anggaran publik sebagai pilar *good governance* pada pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14895–14899. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4605>.
- Katho, D. M., & Irawan, A. S. (2020). Analisis konsistensi antara dokumen perencanaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2009–2014). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.22146/abis.v4i3.59328>
- Khoirunurrofik, K., & Rahmawati, F. (2021). Planning consistency and the political budget cycle in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(2), 327–350. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2021.v14.i02.p06>
- Laoli, V. (2019). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep *value of money* pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 91–102. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108>
- Nasution, M. I., & Faridani, M. R. (2025). Dilema Audit Kinerja: Antara Pengawasan Seremonial dan Perbaikan Nyata. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(3), 647–660. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i3.235>
- Panggabean, F. Y., Dalimunthe, M. B., Ramli, R., Magdalena, L., & Lingga, R. D. (2023). Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 66–76. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.4184>
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4). <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31072>
- Putri, A. M., & Bataha, K. (2024). Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 4(1), 126–133. <https://doi.org/10.37090/jpap.v4i1.1266>
- Qisthi, M. R., & Pandoyo. (2024). Analisis kinerja monitoring dan evaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Studi di Bappelitbangda Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat). *Reformasi Administrasi*, 11(2). <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.4181>
- Sunah, A. A., & Yudartha, I. P. D. (2025). Accountability as governance: Negotiating performance, power, and bureaucratic culture through SAKIP in Bali. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 30–46. <https://doi.org/10.30598/populis.20.1.30-46>
- Surahmi, S., Ahmad, M. S., & Muttaqin, M. (2025). Evaluasi kinerja pejabat fungsional auditor di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1630–1640. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8136>
- Suridiyanti, W. A., Haliah, & Nurleni. (2024). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *value for money* periode tahun 2019–2021. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 17(1). <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28368>